

**B I O D A T A**


BANGUN TOPO

Nama : Marwan Effendy  
 Tempat/Tanggal Lahir : Lubuklinggau,  
 13 Agustus 1953  
 Jabatan : Jaksa Agung Muda  
 Bidang Pengawasan

**Pendidikan Formal**  
 Sarjana Muda Hukum Unissula (1977)

Sarjana Hukum (Ujian Negara Universitas  
 Diponegoro Semarang-1979)  
 Program Magister Manajemen Universitas  
 Bandar Lampung (2000)  
 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas  
 Padjajaran Bandung (2004)

**Pengalaman kerja:**  
 Kepala Kejaksaan Negeri Liwa (1996)

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan  
 Tinggi Lampung (1999)  
 Kepala Kejaksaan Negeri Bandung (2000)  
 Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan  
 Tinggi DKI Jakarta (2002)  
 Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan  
 Tinggi DKI Jakarta (2002)  
 Asisten Umum Jaksa Agung RI (2004)  
 Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

Direktur Penuntutan JAM Pidsus  
 Kejaksaan Agung  
 Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur  
 Kepala Pusdiklat Kejaksaan RI  
 Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM  
 Pidsus)  
 Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan  
 (Mei 2010 hingga sekarang).

## Marwan Effendy Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

# Memperkeras Sanksi untuk Jaksa Nakal

**S**orotan tajam sedang terarah kepada para penegak hukum di negara ini. Bagaimana tidak, dalam sejumlah tindak pidana, ada dugaan mereka justru menjadi bagian dari konspirasi tindak pidana. Salah satunya adalah institusi Kejaksaan Agung. Dugaan keterlibatan oknum jaksa itu, antara lain, dalam perkara rencana tuntutan (rentut) Gayus Tambunan, pertukaran narapidana di Bojonegoro, serta sejumlah kasus lainnya. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, **Marwan Effendy**, mengaku kejaksaan sedang menyiapkan aturan untuk mengatasi persoalan ini. Berikut petikan wawancara wartawan *Republika* **A Syalaby Ichsan** dengan Marwan Effendy:

### Ada peningkatan jumlah jaksa nakal dari 2009 ke 2010 hingga 59 persen?

Jadi begini, saya sudah sampaikan mengapa akhir-akhir ini ada peningkatan tajam temuan-temuan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan para jaksa. Di sini letaknya peran pengawasan masih kurang, terutama melaksanakan waskat (pengawasan melekat).

### Perbedaan pengawasan melekat dengan pengawasan fungsional?

Pengawasan melekat itu atasan langsung. Sementara untuk pengawasan fungsional itu memang di tiap-tiap institusi ada bagian yang bertugas untuk mengawasi. Kalau kita (Kejaksaan) Jamwas (Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan). Kalau di kepolisian propam.

### Waskat menjadi perhatian utama Jamwas?

Terjadinya penyimpangan yang mengoreng kejaksaan menjadi sorotan karena peran Waskat ini tidak berjalan. Sehingga, ada sistem dalam manajemen yang tidak berjalan. Karena salah satu peran pejabat tersebut adalah mengawasi, kita memprediksi perilaku menyimpang akan menurun. Kalau waskat betul-betul efektif, jadi betul-betul ditingkatkan. Kalau fungsional hanya mem-back up.

### Sudah disosialisasikan sejauh mana Waskat ini?

Saya sudah mengedarkan ke seluruh kajati dan kajari dalam raker (rapat kerja) kejaksaan pada 2010. Kalau terjadi penyimpangan, misalnya, aparat kejaksaan dan pegawai menyimpang, mereka akan ikut dikenakan (sanksi—Red) supaya ada kepedulian. Kenanya di mana? Kenanya karena pengawasan melekatnya

tidak berjalan. Jadi, dia mengabaikan perintah kedinasan.

### Informasinya sedang diusulkan kewenangan penyidikan oleh Jamwas?

Itu pidana khusus, seperti penggelapan, penyuapan, penggelapan barang bukti, uang rampasan, kita tangani sendiri, akan proses sendiri. Kita akan ajukan ke pengadilan melalui kejadi. Tidak lagi diserahkan ke JAM-JAM (Jaksa Agung Muda) yang menangani, karena undang-undang nomor 30 itu menyebut kejaksaan. Tidak harus JAM itu.

### Sudah ditekan Peraturan Jaksa Agung (perja) itu?

Sudah diserahkan ke Pak Jaksa Agung. Setelah perja tentang organisasi baru. Itu tindak lanjut dari keppres. Jadi, menunggu dulu perja itu.

### Anda yakin bisa efektif menurunkan jaksa nakal?

Saya yakin dan optimistis akan drastis penurunan penyimpangan. Selama ini, sanksi jaksa yang

melakukan itu (kenakalan—Red) kurang tajam. Artinya, terlalu ringan. Misalnya, ditunda kenaikan pangkat selama setahun. Risiko terberat paling diberhentikan. Kalau diberhentikan, dia menjadi pengacara.

### Pencopotan tiga kajari dua pekan setelah Basrief menjabat itu rekomendasi Anda?

Itu proses sudah lama. Rangkaian tindakan saya waktu mencopot tiga asisten. Kebetulan pengajuan itu masih di zaman Pak Darmono (pjs Jaksa Agung). Cuma saya umumkan di era Pak Basrief. Setelah mereka mengajukan keberatan, baru saya umumkan.

### Pencopotan Kajari Bojonegoro?

Ini di era Pak Basrief. Saya usulkan kepada Jaksa Agung. Tadinya usulan dari kajati itu dia nanti dikenakan penundaan pangkat, dan yang dikenakan sanksi hanya Widodo, kajari tidak kena, kasi pidsus tidak kena. Tapi, saya melihat itu bukan unsur kelalaian, tapi unsur kesengajaan. Di mana kesengajaannya itu? Mengapa dia mau tukar (penukaran napi) di tengah jalan kan ada, kecuali dia tukar dibawa ke LP (lembaga pemyasyarakatan). Dia *gak* tahu orangnya itu lalai. Kemudian, blangko CR 8 (blangko pemindahan tahanan—Red) pelaksanaan eksekusi pengadilan itu kosong. Mengapa tidak diisi. Mungkin antara dua. Bisa juga jaksanya ini bohongi si Widodo.

Lalai atau memang si jaksa sudah tahu. Tapi, saya lebih cenderung bahwa jaksa sudah tahu, karena sebelumnya si Astomo itu pengacara, sudah menemui jaksanya, tapi jaksa menolak. Seharusnya jaksa sudah tau, dia harusnya waspada *dong*.

Dia lihat sendiri *dong*, cek and ricek orangnya benar *gak*. Atau dia ambil sendiri karena Pasal 270 KUHAP itu menyatakan bahwa tersangka yang mengambil tahanan adalah jaksa. Kalau tidak ada, oleh kasi pidsusnya. Karena itu, saya kenakan cabut jaksanya, karena orang *gini gak* boleh dipakai lagi kejaksaan.

### Kajari lalai karena tidak mengawasi kasi?

Ya. Saya anggap dia masa bodoh, sedangkan pengendalian teknis itu ada pada kajari, ada pada kasi pidsus.

### Fungsi eksaminasi Jamwas juga akan dioptimalkan?

Ya. Kalau dulu eksaminasi dilakukan oleh bidang teknis masing-masing, sekarang *enggak*. Kalau ada aduan masyarakat diduga ada penyimpangan atau perubahan tidak terpuji, sengaja diharapkan menggunakan kekuasaan dengan sarana perkara tadi jadi alat yang digunakan berkas perkara. Misalnya, orang ini jadi saksi, lalu takut diperiksa terus jadi tersangka atau beri petunjuk kepada penyidik untuk dijadikan tersangka, sedangkan alat bukti tidak mendukung. *Cover-nya* rekayasa itu. Nanti kita akan eksaminasi sendiri. Kalau dulu kita minta ke bidang teknis Jampidum dan Jampidsus. Eksaminasi itu meneliti dan menilai apakah perkara hukum sudah benar atau belum.

Selain itu, saya buat satuan khusus (untuk daerah). Karena saya lihat di daerah banyak permasalahan. Kalau ada pengaduan terhadap mereka, saya atasi secara cepat.

### Kasus Cirus itu terkesan berlarut-larut di tangan kepolisian. Pendapat Anda?

Saya tidak mengerti. Seharusnya, sudah jadi berkas perkara. Karena, menurut kita, di was (Jamwas—Red) itu bukti-bukti sudah cukup. Saya sudah minta polisi untuk memeriksa Irfan dan AKP Verly. Kedua orang itu sudah cukup mendukung, ada SMS Haposan juga. Jadi, tidak mungkin Gayus dapat itu kalau tidak dari (Haposan) karena terakhir yang menerima itu Cirus. Menurut Gayus, ia menerima dari Haposan, bukan Cirus. Artinya, Cirus menerima dari Haposan. Bukti itu tidak bisa sepotong-sepotong. Saya melihat *gak* tau mengapa.

### Sudah ditanyakan ke kabareskrim?

Saya tidak akan tanya kabareskrim, yang akan saya tanyakan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan)-nya. Harus dimasukkan ke pidsus (pidana khusus) karena ada juga pidana korupsi. Kalau saya menganggap pemalsuan sebagai sarana memeras Gayus.

### Menurut Anda, bagaimana supaya kasus Cirus lebih cepat?

Sebenarnya, muara penyidikan polisi ada di kejaksaan. Maka, seharusnya polisi bisa mempercepat itu. Saya tidak tahu juga, maka saya minta diserahkan ke pidsus itu.

### Sikap Anda terlalu keras. Anda tidak takut banyak musuh?

Yang namanya jadi jaksa itu banyak risiko. Saya sudah berkecimpung menjadi jaksa di pidsus itu sejak awal jadi jaksa. Ancaman itu, teror melalui telepon, dan sebagainya. Bahkan, sampai sifat-sifat yang metafisik. Tempat duduk saya ada tanah kuburan, ada binatang, ada ular, dari mana kalau *gak* dikirim dengan kekuatan gaib.

Tapi, saya sebagai orang beragama *gak* takut.

■ ed: joko sadewo

